PENTINGNYA PENGETAHUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI HEWAN PELIHARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA

Delila Kania¹, Deni Zein Tarsidi², Darda Abdullah Sjam³, Zakki Abdillah Sjam⁴

¹²³Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, ⁴Fakultas Hukum

¹²³⁴ Universitas Pasundan Bandung

delila@unpas.ac.id¹, denizein@unpas.ac.id²

, darda.abdullah@unpas.ac.id³, zakki.abdillah@unpas.ac.id⁴

ABSTRACT

Pets are animals whose lives partially or completely depend on humans for certain purposes. Humans as animal owners who keep animals are obliged to fulfill the welfare of the animals they care for. The obligations of pet owners are contained in statutory regulations. The purpose of this study is to find out how the state through applicable legal provisions provides animal rights protection for pets. Knowledge of legal protection for pets must be known and implemented by all Indonesian citizens. This research uses literature study method. The results of the research show that the law in Indonesia stipulates that all matters related to animal welfare efforts are a joint obligation between the central government, regional governments, and the community. However, legal protection for animals that are not kept by humans and live on the streets or in an open environment is not specifically regulated in the legal provisions that apply in Indonesia. Legal protection that is subject to severe sanctions is more aimed at wild animals protected by the state because their habitat is almost extinct.

Keywords: *Pets, animal rights, legal protection*

PENDAHULUAN

Hak asasi hewan bagi masyarakat di Indonesia merupakan hal jarang terdengar dan disosialisasikan terhadap masyarakat. Padahal sebagaimana hak asasi manusia, di dunia internasional hak asasi hewan ini melalui *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) telah mengeluarkan *Universal Declaration of Animal Rights* /UDHR (Deklarasi Universal terhadap Hak Asasi Hewan) pada tanggal 15 Oktober tahun 1978.

Deklarasi tersebut diumumkan dari kantor pusat UNESCO yang berlokasi di Paris, Prancis. Menurut Pasal 1 pada UDHR dalam Annas (2020:61) mengatakan, “*all animals are born equal and they have the same rights to existence*”, yaitu semua hewan terlahir sama dan memiliki prinsip esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup. Adapun isi dari UDHR adalah:

- a. Hak untuk mendapatkan hak yang sama dalam kehidupan;

- b. Hak untuk dihargai;
 - c. Hak untuk terhindar dari perlakuan buruk;
 - d. Hak semua satwa liar untuk hidup bebas di habitat alaminya;
 - e. Hak semua hewan peliharaan agar dapat hidup sesuai dengan ritme alam spesiesnya;
 - f. Hak hewan yang hidup bersama manusia untuk mendapatkan kehidupan sesuai dengan panjang umur alamiahnya dan terhindar dari pengabaian sebagai tindakan kejam;
 - g. Hak hewan yang dipekerjakan oleh manusia untuk dipekerjakan sesuai dengan batas durasi dan intensitas pekerjaan yang wajar;
 - h. Hak hewan yang digunakan dalam eksperimen manusia untuk tidak melibatkan rasa sakit fisik atau mental dan jika hal tersebut maka cara dari eksperimen harus diganti dan dikembangkan kembali;
 - i. Larangan untuk mengeksploitasi hewan sebagai objek hiburan atau pertunjukan;
Larangan untuk menggunakan *biocide*;
 - j. Larangan melakukan tindakan pembunuhan satwa liar secara masif atau dapat disebut juga dengan genosida, karena merupakan kejahatan terhadap spesies;
 - k. Keharusan untuk memperlakukan hewan yang sudah mati dengan baik;
 - l. Perlindungan hukum yang dibutuhkan terhadap hewan dalam peraturan, dimana dalam pasal terakhir ini ditegaskan bahwa deklarasi ini mengakui hubungan antara hak-hak binatang dan hak asasi manusia, yang sekali lagi dengan tegas menegaskan prinsip yang paling esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup.
- Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagi para penyayang hewan. Contoh hewan peliharaan tersebut antara lain, kucing, anjing, burung, ayam, ikan dan lain-lain. Namun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hidup dari hewan itu sendiri sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya pengetahuan pemilik terhadap hewan peliharaan yang dimilikinya dan kurangnya fasilitas yang menunjang kesejahteraan hewan peliharaan. Contohnya hewan yang terus menerus dikurung dalam kandang. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan

hukum terhadap hewan peliharaan juga berdampak pada hal negatif lainnya, antara lain bertambahnya kasus penelantaran hewan-hewan peliharaan yang dibuang di jalanan. karena hewan tersebut berpenyakit sehingga tidak terlihat lucu lagi atau beranak banyak. Padahal di Indonesia perlindungan hukum bagi hewan peliharaan ini telah diatur dalam undang-undang. Namun sayangnya sosialisasi tentang ketentuan hukum terhadap perlindungan hewan ini tidak terlalu banyak diketahui oleh masyarakat. Menurut *Asia for Animals (AfA) Coalition*, dari 5.480 konten penyiksaan hewan sebanyak 1.626 konten berlokasi di Indonesia. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil konten kekerasan hewan. Riset ini dilakukan sejak bulan Juli 2020 hingga bulan Agustus 2021(Soclife.com:2023).

Kabar terakhir pada Oktober 2021 Indonesia menjadi negara dengan peringkat pertama atas konten penyiksaan terhadap hewan(Iswara:2021). Hasil observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki hewan peliharaan rata-rata tidak pernah mendapatkan edukasi atau pengetahuan tentang perlindungan

hewan secara spesifik baik selama mengenyam pendidikan di persekolahan bahkan sampai perguruan tinggi. Adapun saat ini banyak pula di kalangan masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan hewan dengan melakukan pemberian pakan kucing di jalanan, berdirinya rumah singgah/shelter kucing atau anjing. Namun itu semua belum berhasil meminimalisir tindakan semena-mena dari orang-orang yang tidak peduli dan nyaris tidak menyukai keberadaan hewan-hewan peliharaan (seperti anjing dan kucing)yang berkeliaran di lingkungan masyarakat. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimanakah negara kesatuan Republik Indonesia memberi perlindungan hukum terhadap hewan-hewan peliharaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi pustaka (*library research*) dalam Adlini dan kawan-kawan(2022) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam

penelitian menurut Zed(2004) yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya (Adlini dkk:2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI *online*: 2023) hewan atau binatang merupakan makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi (seperti anjing, kerbau, semut). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disingkat UU PKH) memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan,

hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya (Pasal 1 ayat (3) UU PKH).
- b. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu (Pasal 1 ayat (4) UU PKH).
- c. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian (Pasal 1 ayat (5) UU PKH).

Ketentuan yang isinya mengatur hak asasi hewan terdapat dalam pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (selanjutnya disingkat PP No.95 Tahun 2012) yang menyatakan bahwa :

- (2) Kesejahteraan Hewan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan

Hewan yang meliputi bebas:

- a. dari rasa lapar dan haus;
- b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Bila merunut ketentuan hukum yang diatur dalam PP No.95 tahun 2012 maka para pemilik hewan peliharaan wajib memenuhi hak asasi hewan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut. Bahkan saat hewan peliharaan itu sakit dan beranak pinak. Pada kenyataannya banyak sekali hewan-hewan yang sudah tidak bagus dan lucu lagi karena berpenyakit, pemiliknya tanpa rasa tanggung jawab membuang begitu saja hewan peliharaannya seperti kucing dan anjing ke jalanan bahkan ke tempat yang jauh dari jangkauan manusia. Indonesia memiliki beberapa hukum yang mengatur perlindungan terhadap hewan. Dalam konsep hak asasi hewan yang tercantum dalam pasal 302 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tentang Penganiayaan Ringan pada hewan menyatakan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

Ke-1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya.

Ke-2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat

lainnya, atau mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- (3) jika hewan kepunyaan yang bersalah, maka hewan dapat dirampas.
- (4) percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Menurut Susilo (1988:221) mengebiri hewan dengan tujuan yang baik tidak dikenakan pasal ini asalkan dilakukan dengan tujuan yang patut dan tidak melampaui batas, tidak bisa disebut dengan kejahatan namun hal ini harus ditinjau kembali dan juga tergantung dari keputusan terletak pada hakim. Jika perbuatan dalam pasal (1) mengakibatkan hal-hal yang tercantum pada pasal (2) maka kejahatan itu disebut penganiayaan hewan. Selanjutnya pasal 406 ayat (2) KUHP menyatakan:“(2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin hal dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Lalu dalam pasal 407 ayat (2) KUHP menyatakan: “Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan atau, jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku”.

Hewan yang termasuk dalam pasal 101 KUHP adalah hewan ternak/mamah biak.

Ketentuan selanjutnya diatur dalam UU PKH Pasal 66 ayat (2) huruf b, c, d, e, g yang telah memenuhi standard *Organisation of Animal Health(OIE)* (Wardani dkk,2022:3556). Isi Pasal 66 A tersebut menyatakan :

1. Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 A ayat (1) UU PKH maka akan dipidana dengan pidana kurungan

paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun Bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 66 A ayat (2) UU PKH maka akan dipidana 1 bulan dan paling lama 3 bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00.(tiga juta rupiah).

Pengetahuan hukum (Soekanto,1985) adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur didalam hukum tertulis. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Baik itu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum yang dimaksud adalah pengetahuan seseorang tentang perlindungan hewan peliharaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman hukum (Soekanto, 1985) adalah sejumlah informasi yang dimiliki

seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. ini memiliki arti bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki pemahaman hukum jika mengetahui aturan-aturan hukum tersebut terutama dari segi isinya. Ini berarti orang tersebut sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut. Sebagaimana hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hewan peliharaan merasa telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemilik hewan bila telah memberi tempat dan makan yang cukup. Untuk sampai ke pemahaman dari pengetahuan bagaimana memenuhi kesejahteraan hewan peliharaan yang telah diatur oleh undang-undang mereka sama sekali tidak mengetahuinya . Bagi mereka selama bisa melindungi hewan tersebut dengan baik dan tidak menyakitinya itu sudah cukup. Dengan demikian pandangan masyarakat khususnya pemilik hewan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hewan tidak dianggap penting dalam kehidupan

manusia. Padahal bila melihat perlindungan hukum bagi hewan peliharaan yang sudah ada di Indonesia telah menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan hewan-hewan peliharaan tersebut dalam perlindungan hukum negara.

KESIMPULAN

Pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi hewan peliharaan menjadi hal yang wajib diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia. Baik yang memiliki hewan peliharaan maupun yang tidak memiliki hewan peliharaan. Meski antara hak asasi manusia dengan hak asasi hewan terdapat perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaannya. Namun hal tersebut tidak mengurangi sikap respek dan menghargai hak asasi hewan yang paling esensial sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Animal Rights* /UDHR bahwa “semua hewan terlahir sama dan memiliki prinsip esensial, yaitu kesetaraan hak untuk hidup”.

Ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan.

Adapun ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hewan peliharaan dilihat dari sanksi pidana yang dikenakan tidak seberat sanksi yang dikenakan terhadap hewan-hewan liar yang dilindungi oleh negara. Selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, di dalamnya belum diatur secara tegas berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan sebagai upaya perlindungan hewan, dalam ketentuan tersebut sebatas menjabarkan bahwa kesejahteraan hewan memerlukan kecukupan pangan, ekspresi perilaku secara normal, serta proses tumbuh kembang yang aman dan nyaman.

Maka pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi hewan

peliharaan ini wajib diketahui oleh para pemilik hewan peliharaan. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak asasi hewan baik untuk hewan peliharaan maupun hewan yang hidup berdampingan dengan manusia. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Jurnal :

Adlini Miza Nina dkk,(2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Edu Maspul Jurnal Pendidikan : Vol 6, No 1 diakses dari <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177> tanggal 28-2-2022

Wardani ,Niken Cindy Esya dkk.(2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik(Kucing & Anjing) Dalam Kehidupan masyarakat di Beberapa*

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Buku :

Moeljatno.(2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-31, Jakarta: Bumi Aksara

Soesilo R,(1988), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

Soekanto, Soerjono.(1985). *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Negara(Indonesia-Amerika Serikat-Turki), Jurnal Dinamika,Vol.28 No.3 Bulan Januari 2022 diakses dari <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2957787&val=26360&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20HAK%20ASASI%20HEWAN%20DOMESTIK%20KUCING%20DAN%20ANJING%20DALAM%20KEHIDUPAN%20MASYARAKAT%20Di%20Beberapa%20Negara%20IndonesiaAmerika%20Serikat-Turki> tanggal 20-02-

2023

Annas, Alwi Fajri & Nenden Fatimah
Zhahabiyah.(2020).

*Penyelundupan Orangutan dalam
Konsep Perlindungan Satwa Liar
dan Hukum Positif Indonesia,*
Padjajaran Law Review Vol.8 No.1
Tahun 2020

Diakses dari
<file:///C:/Users/x390/Downloads/23-Article%20Text-357-1-10-20201013.pdf> tanggal 20-2-2023

[pertama-dunia-dalam-penghasil-
konten-kekerasan-hewan](#) tanggal
20-02-2023

Internet :s

Aditya Jaya Iswara , *Indonesia
Peringkat Pertama Penyiksa
Hewan di Dunia*, Kompas, 3
Oktober 2021, diakses dari
[https://ummaspul.e-
journal.id/maspuljr/article/view/33
94/1177](https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177) tanggal 20-2-2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*
diakses dari
<https://kbbi.web.id/binatang>
tanggal 20-2-2022

Soclyfe *online,Indonesia Menempati
Peringkat Pertama Dunia Dalam
Penghasil Konten Kekerasan
Hewan*, socreative_16-09-2022
diakses dari
[https://www.soclyfe.com/baca/ind
onesia-menempati-peringkat-](https://www.soclyfe.com/baca/indonesia-menempati-peringkat-)